

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU (013.06.2100) IMIGRASI
UNTUK PERIODE SEMESTER II T.A 2023



JLN: Sultan Babullah
Nomor 17-18 Ambon

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 22 Januari 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Sub Bagian Pengelolaan
Keuangan dan Barang Milik
Negara



Maichel W Huwae
NIP. 198105032006041002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	17
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
VI. Lampiran dan Daftar	46

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU**
JL. Sultan babullan No. 17-18, Ambon
TELEPON 0911-352803

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku (Ditjen Imigrasi 013.06.2100.408895) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 22 Januari 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Sub Bagian Pengelolaan
Keuangan dan Barang Milik
Negara



Maichel W Huwae
NIP. 198105032006041002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.451.547.866 atau mencapai 333.54 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.634.450.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp.25.914.563.738 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.26.160.951.000

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.22426.640.450., yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.905.366.667 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.21.520.893.783 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.12.227.000

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.8.050.000., dan Rp.22.418.590.450,-

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.5.283.675.468 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.24.746.794.830 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(19.463.119.362) Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.160.522.398 dan sebesar Rp.(19.302.596.964) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(19.302.596.964)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.20.055.122.532 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(.(19.302.596.964)) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(19.191.850) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.21.861.256.732 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.22.418.590.450

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2023			Th 2022	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Pendapatan negara Bukan Pajak	B.1	1,634,450,000	5,451,547,866	1,170,179,415	334.00	2,729,129,415
Jumlah Pendapatan dan Hibah		1,634,450,000	5,451,547,866	3,817,097,866	333.54	2,729,129,415
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3	5,062,473,000	5,027,148,751	(35,324,249)	99.00	5,590,637,673
Belanja Barang	B.4	17,379,716,000	17,200,325,641	(179,390,359)	99.00	11,555,333,179
Belanja Modal	B.5	3,718,762,000	3,687,089,346	(31,672,654)	99.00	2,073,377,824
Belanja Bantuan Sosial	B.6					
Jumlah Belanja		26,160,951,000	25,914,563,738	(246,387,262)	99.06	19,219,348,676

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.5	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Pendek	C.1.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.10	-	-
Persediaan	C.1.10	905,366,667	350,870,918
JUMLAH ASET LANCAR		905,366,667	350,870,918
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	3,142,784,000	3,142,784,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	16,077,224,902	13,734,678,854
Gedung dan Bangunan	C.2.3	19,388,063,919	18,191,502,191
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	12,227,000	12,227,000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(17,099,406,038)	(15,378,972,931)
JUMLAH ASET TETAP		21,520,893,783	19,702,219,114
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3.1	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.3	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	21,284,215	20,906,432
Aset Lain-Lain	C.4.2	2,039,469,384	2,215,046,884
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(2,060,183,599)	(2,233,220,816)
JUMLAH ASET LAINNYA		380,000	2,732,500
JUMLAH ASET		22,426,640,450	20,055,822,532
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	-	-
Hiba yang belum di sahkan	C.5.3	-	-
Pendapatan diterima dimuka	C.5.4	8,050,000	700,000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		8,050,000	700,000
JUMLAH KEWAJIBAN		8,050,000	700,000
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	22,418,590,450	20,055,122,532
JUMLAH EKUITAS		22,418,590,450	20,055,122,532
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		22,426,640,450	20,055,822,532

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5,283,675,468	2,724,729,254
JUMLAH PENDAPATAN		5,283,675,468	2,724,729,254
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5,027,148,751	5,578,645,907
Beban Persediaan	D.3	1,298,069,419	819,494,252
Beban Barang dan Jasa	D.4	8,080,929,785	6,283,987,566
Beban Pemeliharaan	D.5	1,071,648,050	998,789,528
Beban Perjalanan Dinas	D.6	7,506,246,806	3,876,764,119
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1,762,752,019	1,657,010,488
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		24,746,794,830	19,214,691,860
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(19,463,119,362)	(15,874,650,693)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13,343,400	42,780,161
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13,343,400	42,780,161
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	160,522,398	42,780,161
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(19,320,596,964)	(16,447,482,445)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(19,320,596,964)	(16,447,482,445)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	20,055,122,532	19,413,355,510
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(19,302,596,964)	(16,449,026,445)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(195,191,850)	(155,994)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	155,994
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	(195,191,850)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(195,191,850)	155,994
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	21,861,256,732	17,091,337,473
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2,363,467,918	641,767,022
EKUITAS AKHIR	E.6	22,418,590,450	20,055,122,532

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Akuntansi KUHAM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Sultan Babullah No. 17-18, Kota Ambon.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berkomitmen dengan misi "**mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas.**" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Bogor adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan- LRA</i>	<p>(1) Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
<i>Pendapatan LO</i>	<p>(2) Pendapatan-LO Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. <p>Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.</p>
<i>Belanja</i>	<p>(3) Belanja Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>
<i>Beban</i>	<p>(4) Beban</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, • Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
<i>Aset</i>	<p>5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya</p>
<i>Aset Lancar</i>	<p>a. Aset Lancar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama

dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

Aset Lainnya

- pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- e. Aset Lainnya**
- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
 - Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
 - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi

penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku (Wilayah Imigrasi) memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.160.951.000. Selama tahun 2023, Kantor Wilayah dan jajaran Imigrasi kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	1.634.450.000	1.634.450.000
Jumlah Pendapatan	1.634.450.000	1.634.450.000
Belanja		
Belanja Pegawai	5.590.023.000	5.062.473.000
Belanja Barang	13.686.466.000	17.379.716.000
Belanja Modal	2.930.140.000	3.718.762.000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	22.206.629.000	26.160.951.000

Realisasi
Pendapatan
Rp5.451.547.866

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.451.547.866 atau mencapai 334 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.634.450.000. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan paspor, Visa, izin masuk ke luar dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin		146.418.999	
Pendapatan dari pemindah tangan BMN lainnya		759.999	
Pndapatan sewa tanah gedung dan bangunan		8.875.468	
Pendapatan Paspor	893.000.000	3.288.450.000	368.25
Pendapatan Visa	574.100.000	422.000.000	73.51
Pendapatan Izin Keimigrasian	163.350.000	1.378.800.000	844.08
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	4.000.000	192.800.000	4822.5
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		13.343.400	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL			
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		4.698.832	
Jumlah	1.634.450.000	5.451.547.866	333.54

Realisasi Pendapatan TA 2023 Meningkat sebab penyetoran Paspor, Visa dan lain-lain masuk pada satker masing-masing TA 2022. Dan ada pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian	Perbandingan 2023 dan 2022		
	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	146.418.999		
Pendapatan dari pemindah tangan BMN lainnya	759.999	7.929.254	
Pndapatan sewa tanah gedung dan bangunan	8.875.468	1.474.100.000	
Pendapatan Paspor	3.288.450.000	196.500.000	
Pendapatan Visa	422.000.000	920.900.000	
Pendapatan Izin Keimigrasian	1.378.800.000	125.000.000	
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	192.800.000	1.329	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	13.343.400		
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		4.698.832	
Jumlah	5.451.547.866	2.729.129.415	

Realisasi Belanja
Rp25.914.563.738

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku pada TA 2023 adalah sebesar Rp25.914.563.738 atau 99,45% dari anggaran belanja sebesar Rp.25.160.951.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5,062,473,000	5,027,148,751	99
Belanja Barang	17,379,716,000	17,200,325,641	99
Belanja Modal	3,718,762,000	3,687,089,346	99
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	-	-	0
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah	26,160,951,000	25,914,563,738	99,45

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 15,24 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Ada penambahan anggaran pada belanja modal gedung dan bangunan di tahun anggaran 2023

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5,027,148,751	5,590,637,673	3.15
Belanja Barang	17,200,325,641	11,555,333,179	48.85
Belanja Modal	3,687,089,346	2,073,377,824	10.00
Belanja Bantuan Sosial			
Jumlah	25,914,563,738	19,219,348,676	34.84

Belanja Pegawai
Rp5.027.148.751

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.027.148.751 dan Rp5.590.637.673. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja Kotor	5.027.148.751	5.591.378.446	0.45
Pengembalian Belanja Pegawai	51	740.773	100
Jumlah Belanja	5.027.148.802	5.590.637.673	10.00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.200.325.641 dan Rp11.555.333.179. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang			
Jumlah Belanja kotor	17.227.067.961	11.568.355.979	35.
Pengembalian belanja	26.742.320	13.022.800	50
Jumlah Belanja	17.200.325.641	11.555.333.179	35

Belanja Modal
Rp3.687.089.346

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.687.089.346 dan Rp2.073.377.824. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.557.577.618	457.167.400	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.129.511.728	1.616.210.424	0.00

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2022 karena tidak ada anggaran yang digunakan untuk belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.557.577.618

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp2.557.577.618, mengalami kenaikan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp457.167.400. Hal ini disebabkan karena ada anggaran yang digunakan untuk belanja modal peralatan dan mesin .

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Komputer Unit	2.557.577.618	457.167.400	100
A.C Split			
Meja dan Kursi			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	2.557.577.618	Rp457.167.400	100

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp1.129.511.728

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.129.511.728 dan Rp1.616.210.424. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami Penurunan sebesar 45 persen dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Renovasi Gedung Kantor			
Jumlah Belanja Kotor	1.129.511.728	1.616.210.424	0.25
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	1.129.511.728	1.616.210.424	0,25

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami/kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran yang digunakan untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Modal Jaringan			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp905.366.667

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp905.366.667 dan Rp350.870.918.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri No. Rek XXX	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0*

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang Bukan Pajak
Rp0*

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

**C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1		-	-
2		-	-
3			
4			
5			
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1		-	-
2		-	-
3			
4			
5			
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Akuntansi Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	0	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	0	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	0	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	0	-

Beban Dibayar di Muka

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah	-	-

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp.8.050.000

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp Rp.8.050.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2023 dan 2022*

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Paspor di bulan desember terbaca di bulan januari 2024	8,050,000	-
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	-	-
Jumlah	8,050,000	-

Persediaan
Rp905.366.667

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp905.366.667 dan Rp350.870.918 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	904,286,667	349,790,918
Amunisi	1,080,000	1,080,000
Suku Cadang		
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	905,366,667	350,870,918

Aset Tetap
Rp21.520.893.783

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp21.520.893.783 dan Rp19.702.219.114.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan

Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp3.142.784.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.142.784.000 dan Rp3.142.784.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	3,142,784,000
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Ravaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2022	3,142,784,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	3,142,784,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2370 M2	AMBON	2,571,874,000
2	3823 M2	TUAL	570,910,000
3			
4			
5			
Jumlah			3,142,784,000

Peralatan dan Mesin

Rp16.077.224.902

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp16.077.224.902 dan Rp13.734.678.854.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	13,734,678,854
Mutasi tambah:	2,342,546,048
Pembelian	
Hibah	
Transfer Masuk	
Koreksi Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	
Penghapusan	
Saldo Per 31 Desember 2023	16,077,224,902
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(12,148,444,703)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	16,077,224,902

Gedung dan Bangunan

Rp19.388.063.919

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp19.388.063.919 dan Rp18.191.502.191.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	18,191,502,191
Mutasi tambah:	-
Pembangunan Gedung	1,196,561,728
Mutasi kurang:	
Saldo Per 31 Desember 2023	19,388,063,919
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(4,128,705,741)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	15,259,358,178

Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Rp0

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	-
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

Aset Tetap Lainnya
Rp12.227.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.227.000 dan Rp12.227.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	12,227,000
Mutasi tambah:	-
-	
Mutasi kurang:	
-	
Saldo Per 31 Desember 2022	12,227,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	(12,227,000)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	12,227,000

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(17.099.406.038)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp (Rp17.099.406.038) dan Rp(15.378.972.931) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	16.077.224.902	(12.640.946.337)	3.436.278.565
2.	Gedung dan Bangunan	19.388.063.919	(4.446.232.701)	14.941.831.218
3.	Aset Tetap Lainnya	12.227.000	(12.227.000)	0
4.	Aset Tetap yang tidak di gunakan dalam operasi pemerintah	1.914.469.384	(1.914.089.384)	380.000
	Jumlah	40.534.769.205	(19.013.495.422)	21.521.237.783

Piutang Jangka Panjang
Rp8.050.000

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.050.000 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Jumlah	0	0

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Panjang Rp0

Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang
TA 2023*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0

Aset Lainnya
Rp380.000

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp380.000 dan Rp2.732.500.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Akuntansi Bogor terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp21.284.215

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp21.284.215 dan Rp20.906.432.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	20.906.432
Mutasi tambah:	377.783
Pembelian	
Saldo Per 31 Desember 2023	21.284.215
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	21.284.215

Aset Lain-Lain
Rp2.039.469.348

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp2.039.469.348 dan Rp2.215.046.884.

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	2.215.046.884
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	(175.577.500)
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	
Saldo Per 31 Desember 2023	2.039.469.348
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(2.060.183.599)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	2.039.469.348

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(2.060.373.599)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(2.060.373.599) dan Rp(2.233.220.816). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud	21.284.215	0	21.284.215
1.				
	Jumlah	20.906.432	377.783	21.284.215
B.	Aset Lain-lain	215.046.884	(175.577.500)	2.039.469.384
	Jumlah	215.046.884	(175.577.500)	2.039.469.384
	Total	215.046.884	(175.577.500)	2.039.469.384

Kewajiban Jangka
Pendek Rp8.050.000

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.050.000 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	
Total		

Pendapatan Diterima di
Muka Rp8.050.000

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp8.050.000 dan Rp700.000

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari Paspor di bayar pada tahun anggaran 2023 pada akhir desember terbaca di aplikasi sakti jatuh pada bulan januari 2024 sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Pendapatan diterima dimuka	8.050.000
Jumlah	8.050.000

Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah		

Ekuitas

Rp22.418.590.450

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar *Rp22.418.590.450* dan *Rp20.055.122.532*. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan

PNBP

Rp5.283.675.468

8

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar *Rp5.283.675.468* dan *Rp2.724.429.254*. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	146.418.999	0	100
Pendapatan dari pemindatangan BMN lainnya	759.999	0	100
Pendapatan sewa tanah dan gedung	8.875.468	7.929.254	10.1
Pendapatan Paspor	3.288.450.000	1.474.100.000	54.25
Pendapatan Visa	422.000.000	196.500.000	75.00
Pendapatan Izin Masuk dan Keluar	1.378.800.000	920.900.000	35.00
Pendapatan Pelayanan keimigrasian lainnya	192.900.000	125.000.000	15.00
Penerimaan Kembali Pegawai TAYL	13.343.400	1.329	100
Penerimaan Kembali modal TAYL		4.696.832	00
Jumlah	5.451.547.866	2.729.129.415	

Beban Pegawai
Rp5.027.148.751

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.027.148.751 dan Rp5.578.645.907. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Gaji pokok PNS	3.510.866.020	3.853.886.754	2,30
Beban pembulatan gaji PNS	77.869	82.544	0.00
Beban Tunj-suami istri PNS	195.735.590	199.833.408	2.30
Beban Tunj-anak PNS	61.284.220	56.790.824	4.60
Beban tunj struktural PNS	172.280.000	171.313.200	0.25
Beban tunj fungsional PNS	81.180.000	134.460.000	2.00
Beban tunj pph PNS	2.059.032	1.772.850	2.00
Beban tunj beras PNS	201.400.020	207.483.300	5.00
Beban uang makan PNS	561.308.000	707.389.000	0.00
Beban tunj umum PNS	131.890.000	137.230.000	1.00
Beban uang lembur PNS	109.068.000	109.145.000	20.10
Jumlah Beban	5.027.148.751	5.578.645.907	00.0

Beban Persediaan
Rp1.298.069.419

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.298.069.419 dan Rp819.494.252. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	1,298,080,373	819,494,252	(58)
beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	-		
Barang Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya			

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp8.080.929.785

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.080.929.785 dan Rp6.283.987.566. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	8,080,929,785	6,283,987,566	0.00
Beban Bahan			#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional Lainnya			
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			#DIV/0!
Beban Sewa			
Beban Jasa Profesi			#DIV/0!
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19			0.00
Beban Jasa Lainnya	0	0	0.00
Jumlah	8,080,929,785	6,283,987,566	28.60

Beban Pemeliharaan Rp1.071.648.050

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp Rp1.071.648.050 dan Rp998.789.528. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	553.040.000	998.789.528	2.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	510.425.550	391.051.022	0.23
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0		
Jumlah Beban	1.063.465.550	391.061.022	3.10

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp7.506.246.806
6

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.506.246.806 dan Rp 3.876.764.119. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Biasa	7,245,766,806	3,597,733,819	101.40
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	113,250,000	132,600,000	(14.59)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27,130,000	30,668,100	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	120,100,000	128,785,000	(6.74)

Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			
Jumlah Beban			

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang			
Jumlah Beban			

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp1.762.752.019

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.762.752.019 dan Rp1.657.010.488. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	%
Beban penyusutan peralatan dan Mesin	668.704.855	935.672.257	6.00
Beban Penyusutan Gedung dan bangunan	507.915.227	556.886.550	0.00
Beban Penyusutan jalan, irigasi dan jaringan			
Beban Penyusutan asset tetap lainnya			
Jumlah Penyusutan	1.762.752.019	1.657.010.488	
Beban Amortisasi Software			

Beban Amortisasi ATB Lainnya			
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain			
Jumlah Amortisasi			
Jumlah Beban	1.762.752.019	1.657.010.488	

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar			
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar			
Jumlah Beban			

Kegiatan Non Operasional Rp0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penjualan Alat Kantor			
Selisih Kurs			
Penyesuaian Nilai Persediaan			
Jumlah Beban			

Pos Luar Biasa Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp20.055.122.53
2

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp20.055.122.532 dan Rp19.413.355.510.

Defisit LO
Rp(19.302.596.94
6

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp(19.302.596.946 dan Rp(16.447.482.445). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi
Rp0
Penyesuaian Nilai
Aset Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp Rp0 dan Rp Rp155.994 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	
Jumlah		0

Selisih Revaluasi
Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp(195.191.850)

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp (195.191.850) dan Rp10544.000.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan

aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	Rp(195.191.850)
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	

Transaksi Antar
Entitas
Rp21.861.256.73
2

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp21.861.256.732 dan Rp17.091.337.473.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel xx

Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	14.653.247.538
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.896.329
Transfer Masuk	20.935.005
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	73.856.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	21.861.256.732

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp5.451.547.866 sedangkan DKEL sebesar Rp0

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan tranfer ke luar sebesarRp.281.470.000

Tabel xx
Transfer Masuk TA 2022

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Transfer Masuk	Ditjen Imigrasi	0
2.	Tranfer Keluar		281.470.000
Jumlah			281.470.000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp281.470.000

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Pengesahan Hibah Langsung TA 2023

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.			
2.			
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir

Rp22.418.590.
450

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp22.418.590.450 dan Rp20.055.122.532

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

1. Masih terdapat pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 8.050.000 pembayaran paspor di tanggal 31 desember 2023 tetapi terbaca pada aplikasi di tahun berikutnya

F.2 Pengungkapan Lain-lain**NIHIL****F.3 Rekapitulasi jumlah satuan kerja UAPPA-W IMIGRASI**

NO	Kode satker	Nama Satker	Jenis Kewenangan	Jumlah satuan
1.	408895	Kanwil Maluku	KD	1
2	408602	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	KD	1
3	662952	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tual	KD	1
		Jumlah		3

F.4 DAFTAR REKENING PEMERINTAH

N O	UP/KANTOR	Nomor Rek	Nama Bank	saldo	Surat persetujuan
1.	Kanwil Hukum dan HAM Ambon	8100124088951000	Bank Mandiri	0	S-472/pb.3/2021
2.	Imigrasi Ambon	650854086021000	BRI	0	S-1232/WBP.12/KP05/2020
3.	Imigrasi Tual	9898016629521000	BNI	0	S-101/PB.3/2021

LAMPIRAN REKON WILAYAH:

1. Laporan Oprasional (LO)
2. Laporan Perubahan Ekuitas
3. Laporan Realisasi Belanja
4. Laporan Realisasi Anggaran
5. Laporan Neraca per 31 Desember 2023
6. Laporan Neraca Percobaan AkruaI
7. Laporan Realisasi Pendapatan
8. Laporan Neraca Saldo Awal
9. Laporan Buku Besar AkruaI
10. Daftar Rekening Pemerintah Per satker
11. Memo Jurnal Tingkat Satker
12. Telaah Laporan Tingkat Wilayah
13. Calk Tingkat Wilayah per 31 Desember 2023
14. Neraca Persediaan Wilayah per 31 Desember 2023
15. Neraca BMN Wilayah per 31 Desember 2023
16. Laporan Penyusutan Wilayah per 31 Desember 2023
17. Gab Intra dan Ekstrakontaibel per 31 Desember 2023